

Restrukturisasi Subsidi Jaminan Kesehatan dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Sosial

Supendi Samian¹, Bagus Margono²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam Nahdlatul Ulama Indramayu
bangsam1926@gmail.com¹, bagusm450@gmail.com²

ABSTRACT

The decile-based restructuring of the National Health Insurance (JKN) subsidy is a government policy aimed at improving fiscal efficiency and targeting of premium assistance recipients (PBI). This policy uses the welfare decile classification from the Integrated Social Welfare Data (DTKS) as the basis for determining subsidy participation. This study aims to analyze the design of the subsidy restructuring policy, its impact on social stability, and its implications within the framework of the welfare state. The study employed a qualitative approach with a policy analysis design through literature review and analysis of official documents. Data were analyzed using an interactive model that encompasses data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that decile-based subsidy restructuring has the potential to improve budget efficiency and support the fiscal sustainability of the JKN program. However, the reliance on data validity and the risk of exclusion errors can have social impacts such as uncertainty about access to health services, decreased perceptions of distributive justice, and weakened public trust. From a welfare state perspective, this policy demonstrates a shift from a universal approach to a residual approach, potentially impacting social cohesion. This study concludes that the success of subsidy restructuring is determined not only by fiscal rationality, but also by the quality of governance, data transparency, and participatory mechanisms capable of maintaining social stability.

Keywords : *subsidy restructuring, National Health Insurance (JKN), welfare deciles, social stability, welfare state.*

ABSTRAK

Restrukturisasi subsidi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berbasis desil merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan efisiensi fiskal dan ketepatan sasaran penerima bantuan iuran (PBI). Kebijakan ini menggunakan klasifikasi desil kesejahteraan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penentuan kepesertaan subsidi. Penelitian ini bertujuan menganalisis desain kebijakan restrukturisasi subsidi, dampaknya terhadap stabilitas sosial, serta implikasinya dalam kerangka negara kesejahteraan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis kebijakan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen resmi. Data dianalisis menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi subsidi berbasis desil berpotensi meningkatkan efisiensi anggaran dan mendukung keberlanjutan fiskal program JKN. Namun demikian, ketergantungan pada validitas data serta risiko kesalahan eksklusi dapat menimbulkan dampak sosial berupa ketidakpastian akses layanan kesehatan, penurunan persepsi keadilan distributif, dan melemahnya kepercayaan publik. Dalam perspektif *welfare state*, kebijakan ini menunjukkan kecenderungan pergeseran dari pendekatan universal menuju residual yang berpotensi memengaruhi kohesi sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan restrukturisasi subsidi tidak hanya ditentukan oleh rasionalitas fiskal, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, transparansi data, serta mekanisme partisipatif yang mampu menjaga stabilitas sosial.

Kata kunci : restrukturisasi subsidi, JKN, desil kesejahteraan, stabilitas sosial, welfare state.

PENDAHULUAN

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan merupakan salah satu instrumen utama negara dalam mewujudkan prinsip *welfare state* sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (2) (UUD 1945, 1945) yang menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Sejak diberlakukan pada tahun 2014, JKN dirancang untuk menjamin akses kesehatan universal (*Universal Health Coverage/UHC*) melalui skema subsidi bagi kelompok miskin dan rentan yang dikategorikan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Namun dalam perkembangannya, program ini menghadapi tantangan serius, terutama terkait defisit pembiayaan dan ketepatan sasaran subsidi (Agustina, T, Susiloretni, K, Achadi, A, Taher, A, 2019). Pemerintah kemudian melakukan berbagai langkah restrukturisasi kebijakan, termasuk penyesuaian data penerima subsidi berbasis sistem desil kesejahteraan yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi fiskal dan memastikan subsidi tepat sasaran sesuai tingkat kesejahteraan masyarakat.

Secara administratif, penggunaan desil sebagai indikator klasifikasi kesejahteraan merupakan pendekatan teknokratis yang dianggap lebih objektif karena berbasis data kuantitatif. Dalam teori kebijakan publik, langkah ini dapat dipahami sebagai bentuk *targeting approach* dalam program perlindungan sosial (Grosh, M, 2008). Pendekatan *targeting* sering dipilih untuk mengurangi kebocoran anggaran dan meningkatkan efektivitas distribusi bantuan.

Namun demikian, dalam praktiknya, restrukturisasi subsidi berbasis desil memunculkan berbagai polemik. Ketidakakuratan data, keterlambatan pemutakhiran informasi, serta dinamika kondisi sosial-ekonomi masyarakat berpotensi menimbulkan kesalahan inklusi (*inclusion error*) maupun kesalahan eksklusi (*exclusion error*). Kesalahan eksklusi, khususnya, dapat menyebabkan kelompok rentan kehilangan akses terhadap layanan kesehatan, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakpuasan publik dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah (World Bank, 2018).

Dari perspektif teori *welfare state*, kebijakan restrukturisasi subsidi yang terlalu menekankan efisiensi fiskal dapat mengarah pada gejala *retrenchment*, yaitu pengurangan peran negara dalam perlindungan sosial (Esping, t.t.1990). Pergeseran dari pendekatan universal menuju pendekatan residual dapat memicu ketimpangan akses layanan publik. Dalam konteks masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan ekonomi tinggi, kebijakan semacam ini berpotensi memicu instabilitas sosial.

Stabilitas sosial sendiri merupakan kondisi di mana masyarakat berada dalam keadaan harmonis, minim konflik, dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi

terhadap institusi negara. Menurut teori integrasi sosial (Durkheim, E, 1893), kohesi sosial sangat dipengaruhi oleh distribusi keadilan dan solidaritas dalam masyarakat. Apabila kebijakan publik dipersepsikan tidak adil atau diskriminatif, maka dapat muncul disorganisasi sosial, resistensi kolektif, hingga delegitimasi otoritas pemerintah.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan penonaktifan atau restrukturisasi peserta BPJS berbasis desil tidak hanya berdampak pada aspek administratif dan fiskal, tetapi juga menyentuh dimensi sosial-politik yang lebih luas. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar dan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi membatasi akses layanan kesehatan harus dianalisis secara komprehensif, tidak hanya dari sisi efisiensi anggaran, tetapi juga dari aspek keadilan distributif dan stabilitas sosial.

Sejauh ini, sebagian besar penelitian mengenai JKN lebih banyak berfokus pada aspek keberlanjutan fiskal, defisit anggaran, dan efisiensi pembiayaan (Agustina, T, Susiloretni, K, Achadi, A, Taher, A, 2019). Kajian yang secara khusus mengaitkan restrukturisasi subsidi berbasis desil dengan stabilitas sosial masih relatif terbatas. Padahal, dalam perspektif administrasi publik dan kebijakan sosial, legitimasi kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi program.

Berdasarkan uraian tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang menjadi fokus kajian ini, yaitu:

1. Bagaimana desain dan implementasi restrukturisasi subsidi jaminan kesehatan berbasis desil dalam program JKN?
2. Bagaimana dampak kebijakan restrukturisasi subsidi tersebut terhadap stabilitas sosial masyarakat?
3. Apakah kebijakan ini lebih mencerminkan upaya efisiensi fiskal semata atau berimplikasi pada potensi instabilitas sosial?

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk memberikan analisis kritis mengenai relasi antara kebijakan fiskal di sektor kesehatan dan dinamika stabilitas sosial dalam kerangka negara kesejahteraan modern. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi kebijakan publik serta rekomendasi praktis bagi perumusan kebijakan subsidi kesehatan yang lebih adil, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis kebijakan (policy analysis). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam substansi kebijakan restrukturisasi subsidi jaminan kesehatan berbasis desil serta implikasinya terhadap stabilitas sosial. Desain analisis kebijakan digunakan untuk mengevaluasi isi (content), konteks (context), dan dampak (impact) kebijakan publik, khususnya dalam kerangka negara kesejahteraan (*welfare state*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan

orientasi normatif-kritis, yaitu menelaah kesesuaian kebijakan dengan prinsip keadilan sosial, efektivitas targeting, dan stabilitas sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desain Restrukturisasi Subsidi Jaminan Kesehatan Berbasis Desil

Restrukturisasi subsidi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilakukan melalui pemuktahiran dan klasifikasi ulang peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) berdasarkan sistem desil kesejahteraan yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sistem desil membagi rumah tangga dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan relative, di mana desil 1 merupakan kelompok paling miskin dan desil 10 paling Sejahtera.

Secara normatif, kebijakan ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran subsidi dengan mengurangi inclusion error dan exclusion error dalam program perlindungan sosial. Pendekatan ini sejalan model proxy means testing dalam teori targeting yang banyak digunakan di negara berkembang (Grosh, 2008)

Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan desil sebagai indikator tunggal memiliki keterbatasan. Validasi data sangat bergantung pada akurasi pendataan dan frekuensi pemuktahiran DTKS. Ketidaktepatan data dapat menyebabkan masyarakat yang secara factual masih rentan justru tidak lagi masuk dalam kategori penerima subsidi. Word Bank (2018) menegaskan bahwa kesalahan eksekusi dalam program bantuan sosial dapat mengurangi efektivitas kebijakan dan meningkatkan risiko ketidakpuasan public.

Selain itu karakteristik ekonomi informasi di Indonesia yang fluktuatif menyebabkan mobilitas kesejahteraan rumah tangga cukup tinggi, sehingga klasifikasi desil berpotensi tidak mencerminkan kondisi riil secara dinamis (Agustina, 2019)

Dampak Fiskal Restrukturisasi Subsidi

Dari perspektif fiskal, restrukturisasi subsidi bertujuan menjaga keberlanjutan pembiayaan JKN yang selama beberapa tahun menghadapi tekanan defisit. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah peserta PBI tanpa diimbangi penyesuaian iuran dan efisiensi pelayanan menjadi salah satu faktor ketidakseimbangan pembiayaan (Agustina, 2019).

Dengan memperketat kriteria penerima subsidi melalui pendekatan desil, pemerintah berupaya melakukan rasionalisasi anggaran agar subsidi lebih fokus pada kelompok miskin ekstrem dan miskin. Dalam teori kebijakan publik, Langkah ini dapat dipahami sebagai bentuk *fiscal consolidation* dalam sistem kesejahteraan (Esping, Anderson, 1990)

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara jangka pendek kebijakan ini berpotensi :

- a. Mengurangi beban subsidi negara
- b. Meningkatkan efisiensi alokasi anggaran Kesehatan

- c. Mendukung stabilitas fiskal program JKN

Dampak Sosial Restrukturisasi Subsidi

- a. Risiko Eksklusi Sosial

Temuan menunjukkan bahwa penonaktifan atau pengalihan status peserta berdasarkan desil dapat menimbulkan risiko eksklusi sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat dengan pendapatan tidak tetap. Kesalahan eksklusi dalam program jaminan sosial berpotensi menghambat akses terhadap layanan kesehatan dasar (World Bank, 2018).

Dalam perspektif welfare state, pengurangan cakupan subsidi dapat mengarah pada model residual yang membatasi peran negara dalam perlindungan sosial (Esping-Andersen, 1990). Hal ini berpotensi meningkatkan ketimpangan akses layanan Kesehatan

- b. Ketidakpastian Akses Layanan Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar dan hak konstitusional warga negara. Ketika status kepersertaan berubah akibat desil, Sebagian masyarakat menghadapi ketidakpastian dalam memperoleh layanan Kesehatan. Kondisi ini dapat memperbesar beban finansial rumah tangga rentan dan meningkatkan risiko kemiskinan akibat biaya Kesehatan (*catastrophic health expenditure*). WHO (2010) menegaskan bahwa pembatasan akses jaminan Kesehatan dapat memperburuk kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat miskin.

- c. Potensi Penurunan Kepercayaan Publik

Stabilitas sosial sangat dipengaruhi oleh legitimasi kebijakan publik. Menurut teori integrasi sosial Durkheim (1893), kohesi sosial bergantung pada persepsi keadilan dan solidaritas dalam masyarakat. Jika kebijakan dipersepsikan tidak transparan atau tidak adil, maka dapat terjadi delegitimasi institusi negara.

Dalam konteks restrukturisasi subsidi JKN, kurangnya sosialisasi dan mekanisme pengaduan yang efektif dapat memperkuat persepsi ketidakadilan. Hal ini berpotensi memicu ketegangan sosial, terutama di wilayah dengan tingkat kerentanan ekonomi tinggi.

1. Temuan Kunci Penelitian

Berdasarkan analisis terhadap dimensi kebijakan fiskal, administratif, dan sosial, diperoleh beberapa temuan utama:

- a. Terdapat trade-off antara efisiensi fiskal dan perlindungan sosial.
- b. Ketepatan data menjadi faktor krusial dalam keberhasilan kebijakan berbasis desil.
- c. Risiko instabilitas sosial muncul ketika kebijakan tidak disertai transparansi dan partisipasi publik.
- d. Restrukturisasi subsidi perlu diimbangi dengan mekanisme verifikasi dan banding yang responsif.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi subsidi jaminan kesehatan berbasis desil bukan hanya persoalan teknis-administratif,

melainkan juga persoalan legitimasi sosial dan keberlanjutan negara kesejahteraan. Stabilitas sosial sangat ditentukan oleh keseimbangan antara rasionalitas fiskal dan prinsip keadilan distributif dalam kebijakan publik.

PEMBAHASAN

Restrukturisasi Subsidi Dalam Perspektif *Welfare State*

Hasil penelitian menunjukkan adanya trade off antara efisiensi fiskal dan perlindungan sosial dalam kebijakan restrukturisasi berbasis desil. Dalam perspektif welfare state, negara memiliki tanggung jawab menjamin akses dasar bagi warga negara, termasuk layanan Kesehatan (Esping, Anderson, 1990)

Kebijakan pengetatan subsidi melalui klasifikasi desil mencerminkan pergeseran dari pendekatan universal menuju pendekatan residual. Dalam model universal layanan Kesehatan dijamin secara luas sebagai hak sosial, sedangkan dalam model residual, intervensi negara dibatasi hanya pada kelompok miskin tertentu. Jika restrukturisasi subsidi terlalu menekankan rasionalisasi anggaran tanpa memperkuat perlindungan sosial, maka kebijakan tersebut berpotensi mengarah pada *welfare retrenchment*, yakni pengurangan peran negara dalam menjamin kesejahteraan public. Kondisi ini dapat menimbulkan ketimpangan akses Kesehatan, terutama bagi kelompok rentan yang tidak sepenuhnya miskin tetapi memiliki kerentanan ekonomi tinggi.

Dengan demikian secara teoritis, kebijakan berbasis desil perlu dipahami bukan sekedar instrument teknokratis, melainkan sebagai bagian dari dinamika transformasi negara kesejahteraan di Indonesia

Targeting Policy dan Problem Akurasi Data

Pendekatan desil dalam penentuan subsidi sejalan dengan teori targeting dalam perlindungan sosial yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran (Grosh, 2008). Namun, efektivitas targeting sangat bergantung pada kualitas data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kesalahan eksklusi menjadi isu sentral dalam implementasi kebijakan ini. Ketika rumah tangga rentan dikeluarkan dari kategori penerima subsidi akibat ketidaktepatan data, maka kebijakan justru menghasilkan dampak kontraproduktif terhadap tujuan perlindungan sosial.

World Bank (2018) menegaskan bahwa kesalahan eksklusi lebih berbahaya dibandingkan kesalahan inklusi dalam konteks program jaminan sosial, karena berimplikasi langsung pada hilangnya akses layanan dasar. Dalam konteks Indonesia yang memiliki struktur ekonomi informal besar dan mobilitas kesejahteraan yang dinamis, klasifikasi desil yang statis berpotensi tidak responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, pembahasan ini menegaskan pentingnya mekanisme verifikasi partisipatif dan pemutakhiran data berkala agar kebijakan berbasis desil tidak menimbulkan ketidakadilan administratif

Implikasi terhadap Stabilitas Sosial

Stabilitas sosial dalam penelitian ini dipahami sebagai kondisi kohesi sosial, kepercayaan publik, dan minimnya konflik sosial. Teori integrasi sosial Durkheim (1893) menyatakan bahwa solidaritas sosial terbentuk ketika terdapat rasa keadilan dan keterikatan bersama dalam sistem sosial.

Ketika kebijakan publik dipersepsikan tidak adil atau diskriminatif, maka legitimasi pemerintah dapat tergerus. Dalam konteks restrukturisasi subsidi JKN, ketidaktransparanan data dan minimnya sosialisasi berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan distributif.

Efisiensi fiskal memang penting dalam menjaga keberlanjutan program JKN (Agustina, 2019), namun stabilitas sosial merupakan prasyarat keberlanjutan kebijakan dalam jangka panjang. Jika kebijakan menyebabkan keresahan sosial atau penurunan kepercayaan publik, maka biaya sosial yang muncul dapat melampaui manfaat fiskal yang diperoleh.

Dengan demikian, stabilitas sosial menjadi variabel kunci dalam menilai keberhasilan kebijakan restrukturisasi subsidi, bukan hanya indikator defisit anggaran.

Restrukturisasi Subsidi dan Prinsip *Good Governance*

Dari perspektif administrasi publik, kebijakan berbasis data desil harus memenuhi prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata pada desain kebijakan, melainkan pada tata kelola implementasi. Ketika masyarakat tidak memahami dasar klasifikasi desil atau tidak memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan yang efektif, maka kebijakan kehilangan legitimasi administratifnya.

Prinsip akuntabilitas menuntut adanya mekanisme banding atau koreksi bagi peserta yang merasa dirugikan. Transparansi data juga menjadi krusial agar masyarakat dapat memahami dasar pengambilan keputusan pemerintah. Tanpa itu, kebijakan berpotensi dianggap sebagai bentuk rasionalisasi sepihak yang mengabaikan dimensi sosial.

Dalam kerangka ini, restrukturisasi subsidi harus ditempatkan dalam paradigma *responsive governance*, di mana pemerintah tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga menjamin keadilan dan partisipasi publik.

Sistem Analitis

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa restrukturisasi subsidi jaminan kesehatan berbasis desil merupakan kebijakan yang berada pada persimpangan antara rasionalitas fiskal dan keadilan sosial.

- a. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa:
- b. Efisiensi fiskal dapat tercapai melalui pengendalian subsidi.
- c. Namun, risiko eksklusi sosial dapat mengganggu stabilitas sosial.

- d. Stabilitas sosial sangat bergantung pada legitimasi kebijakan dan kualitas tata kelola data.
- e. Kebijakan yang terlalu teknokratis tanpa sensitivitas sosial berpotensi melemahkan kohesi masyarakat.

Dengan demikian, restrukturisasi subsidi tidak dapat dinilai hanya melalui indikator keuangan, tetapi harus dianalisis dalam kerangka multidimensional yang mencakup aspek fiskal, administratif, dan sosial.

Dalam konteks negara kesejahteraan modern, keberhasilan kebijakan sosial terletak pada kemampuannya menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan keadilan distributif serta menjaga stabilitas sosial sebagai fondasi pembangunan nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa restrukturisasi subsidi jaminan kesehatan berbasis desil merupakan kebijakan yang secara normatif diarahkan untuk meningkatkan efisiensi fiskal dan ketepatan sasaran dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penggunaan klasifikasi desil sebagai instrumen penentuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) mencerminkan pendekatan *targeting policy* yang bertujuan mengurangi kebocoran anggaran dan menjaga keberlanjutan pembiayaan sistem jaminan kesehatan nasional.

Dari perspektif fiskal, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak positif berupa rasionalisasi anggaran dan penguatan stabilitas keuangan program JKN. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa efisiensi administratif dan fiskal tidak selalu berbanding lurus dengan perlindungan sosial yang optimal. Ketergantungan pada validitas data desil serta keterbatasan mekanisme verifikasi dan pemutakhiran data berpotensi menimbulkan kesalahan eksklusi yang berdampak langsung pada kelompok rentan.

Dalam kerangka teori *welfare state*, restrukturisasi subsidi yang terlalu menekankan efisiensi dapat mengarah pada kecenderungan *welfare retrenchment*, yakni penyempitan peran negara dalam perlindungan sosial. Pergeseran dari pendekatan universal menuju pendekatan residual berpotensi menciptakan ketimpangan akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi fluktuatif dan berada di sektor informal.

Lebih jauh, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan restrukturisasi subsidi tidak hanya berdimensi teknokratis dan fiskal, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial. Stabilitas sosial sangat dipengaruhi oleh persepsi keadilan distributif, transparansi kebijakan, serta tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika kebijakan dipersepsikan tidak adil atau tidak transparan, maka legitimasi institusi negara dapat melemah, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketegangan sosial.

Dengan demikian, keberhasilan restrukturisasi subsidi jaminan kesehatan berbasis desil sangat ditentukan oleh keseimbangan antara efisiensi fiskal dan keadilan sosial. Kebijakan ini memerlukan tata kelola yang transparan, mekanisme

partisipatif dalam pemutakhiran data, serta sistem pengaduan yang responsif agar tidak menimbulkan eksklusi sosial yang mengganggu kohesi dan stabilitas masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa restrukturisasi subsidi jaminan kesehatan harus dipahami sebagai kebijakan multidimensional yang menuntut integrasi antara rasionalitas ekonomi, prinsip keadilan distributif, dan keberlanjutan sosial dalam kerangka negara kesejahteraan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, T, Susiloretni, K, Achadi, A, Taher, A. (2019). Cakupan kesehatan universal di Indonesia: Konsep, perkembangan, dan tantangan. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30579611/>, 75–102. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31647-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31647-7)
- Durkheim, E. D., E. (1893). *The Division of Labour in Society*. Free Press.
- Esping, A., G. (t.t.). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton University Press.
- Grosh, M, del N., C. ., Tesliuc, E. ., Ouerghi, A. (2008). For Protection and The Design and Implementation of Effective Safety Nets. *Open Knowledge Repository*. <https://doi.org/doi.org/10.1596/978-0-8213-7581-5>
- UU 1945. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- World Bank. (2018). *The State of Social Safety Nets* [Post].